

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA
HARIAN LEPAS (PHL) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN
RUANG KOTA PADANG**

Oleh:

FAIZUL ABIDIN

1210113130



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2019

No. Reg: 18 /PK-VII/I-2019

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG

(Faizul Abidin; 1210113130 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2018)

ABSTRAK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Kota Padang dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk menyokong kinerjanya. Bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Harian Lepas tersebut rawan dengan resiko kecelakaan kerja, sehingga jaminan sosial terhadap PHL ini penting untuk dilaksanakan. Jaminan sosial merupakan hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1, 2 & 3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Nasional dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Sosial terhadap Pekerja Harian Lepas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, 2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris/sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Pelaksanaan program jaminan sosial terhadap Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Para pekerja mendapatkan jaminan sosial berupa biaya pengobatan dan santunan jika terjadi kecelakaan kerja, namun secara formal pelaksanaan jaminan sosial ini belum dimuat dalam *SOP (Standart Operational Procedure)* khusus, 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial terhadap Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang ini adalah - Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tentang informasi jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja Harian Lepas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang kurang dalam hal menggiatkan pelaksanaan jaminan sosial bagi Pekerja Harian Lepas, belum adanya *SOP (Standart Operational Procedure)* dan Anggaran khusus untuk program jaminan sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Pekerja Harian Lepas.